



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553  
Tromol Pos Nomor 212 Jakarta 15160 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 62 /BUA/TI1.4.1/X/2025  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : Satu Rangkap  
Hal : Pemberitahuan Penonaktifan dan  
Perubahan Domain Aplikasi SPSE serta  
Imbauan Keamanan Pengelolaan Akun

Jakarta, 10 Oktober 2025

Kepada Yth :

1. Para Sekretaris Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung
2. Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Administrasi;
3. Para Sekretaris Tingkat Banding;
4. Para Sekretaris Tingkat Pertama.

Di -

Tempat

Berdasarkan Surat Plt. Direktur Sistem Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21524/D.2.2/10/2025 tanggal 2 Oktober 2025 perihal Pemberitahuan Penonaktifan Layanan Redirecting Domain Aplikasi SPSE dan Himbauan Keamanan Pengelolaan Akun, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan adanya penonaktifan layanan redirecting domain aplikasi SPSE oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), maka Mahkamah Agung melakukan penonaktifan terhadap domain lama, yaitu <https://lpse.mahkamahagung.go.id>, sehingga akses terhadap sistem SPSE Mahkamah Agung selanjutnya dilakukan melalui halaman resmi <https://spse.inaproc.id/mahkamahagung>.
2. Menginformasikan kepada seluruh pengguna aplikasi SPSE agar mengakses layanan pengadaan pemerintah melalui domain resmi [spse.inaproc.id](https://spse.inaproc.id), mengingat telah ditemukan sejumlah domain tiruan yang menyerupai tampilan aplikasi SPSE dan berpotensi mengeksploitasi informasi sensitif seperti user ID dan password.
3. Memastikan menggunakan alamat surat elektronik (email) yang valid pada saat pembuatan akun aplikasi SPSE, agar seluruh informasi dan notifikasi resmi dari sistem dapat diterima secara tepat oleh pengguna.
4. Mengaktifkan fitur verifikasi dua langkah (Two-Factor Authentication/2FA) pada seluruh akun pengguna SPSE, guna meningkatkan keamanan sistem serta meminimalkan penyalahgunaan akses.
5. Segera melaporkan setiap insiden keamanan siber yang terjadi pada transaksi SPSE maupun sistem pendukungnya kepada LKPP, UKPBJ Mahkamah Agung RI, dan Tim Respons Insiden Keamanan Komputer (CSIRT) Mahkamah Agung RI.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sobandi

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi selaku Kepala UKPBJ Mahkamah Agung RI.